

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HAMBATAN DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa)

Aji Portuna

Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Penulis Korespondensi: ajia24424@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 26 Juni 2026 Accepted: 02 Agustus 2026 Published: 31 Agustus 2026	<i>Community participation is a key determinant of successful village development, yet in Kalabeso Village, Buer District, participation remains suboptimal. Residents are mostly involved in physical implementation (mutual cooperation), while involvement in planning (Musrenbangdes) and evaluation remains largely symbolic, especially among women and youth. This study aims to describes the forms and levels of community participation and identifies its barriers using a qualitative descriptive approach, with in-depth interviews of seven informant groups, field observation, and document review, analyzed through Talcott Parsons' Structural Functionalism and the AGIL scheme (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency). Results of this study showed that the integration function works best, sustained by mutual-cooperation values and Islamic teachings. Adaptation and Goal Attainment perform fairly well, with 80% of RPJMDes targets achieved, though women's and youth's aspirations remain under-represented. The Latency function faces the greatest threat from the younger generation's shift toward individualism and dependence on instant social aid. Main barriers include short-term benefit orientation, agricultural economic pressure, gender norms, and reliance on RT/RW intermediaries. An inclusive, locally grounded, and gender-equitable development approach is needed to strengthen participation.</i>
Keywords Community Participation; Participation Barriers; Village Development.	

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahap prosesnya. Partisipasi bukan sekadar kehadiran fisik, melainkan keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. UNDP (2023) menegaskan bahwa pembangunan berbasis partisipasi masyarakat terbukti meningkatkan efektivitas program sosial dan memperkuat rasa kepemilikan warga terhadap hasil pembangunan, sekaligus menjadi koreksi terhadap paradigma top-down yang kerap gagal mengakomodasi kebutuhan lokal. Partisipasi masyarakat dengan demikian bukan hanya instrumen teknis pembangunan, melainkan wujud nyata demokratisasi sosial yang menempatkan warga sebagai aktor utama perubahan.

Talcott Parsons memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang kompleks dan saling bergantung, di mana setiap bagian memiliki fungsi yang berkontribusi terhadap stabilitas sistem secara keseluruhan (Parsons, 1951; Soekanto, 1986). Untuk menjelaskan hal ini, Parsons mengembangkan skema AGIL yang terdiri atas empat fungsi esensial suatu sistem sosial: *Adaptation* (A) kemampuan sistem menyesuaikan diri dan mengelola sumber daya terhadap lingkungan eksternal; *Goal Attainment* (G) kemampuan menetapkan tujuan bersama dan mengarahkan sumber daya untuk mencapainya; *Integration* (I) fungsi menjaga kohesi dan koordinasi antarsubsistem agar tidak terjadi disorganisasi sosial; serta *Latency* atau *pattern maintenance* (L) pemeliharaan nilai, norma, dan motivasi yang menjadi dasar legitimasi sosial.

Parsons menegaskan bahwa keempat fungsi tersebut bersifat komplementer; melemahnya satu fungsi akan berdampak sistemik pada fungsi lainnya dan berpotensi memunculkan disfungsi sosial. Dalam konteks partisipasi pembangunan desa, fungsi Integrasi menjadi titik analisis utama karena keterlibatan warga dalam setiap tahap pembangunan menjaga kohesi sosial dan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah desa, sementara hambatan partisipasi seperti dominasi elite lokal atau lemahnya kepercayaan wargamenjad i indikator disfungsi pada subsistem sosial dan politik desa. Kerangka AGIL dengan demikian relevan digunakan sebagai grand theory untuk menganalisis bagaimana struktur sosial, nilai budaya, dan tingkat partisipasi saling berkaitan di Desa Kalabeso.

Pembangunan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek pembangunan, dan menegaskan peralihan dari model top-down menuju bottom-up yang inklusif (Chambers, 1997; Friedmann, 1992). Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang dikembangkan Chambers (1997) menekankan bahwa masyarakat harus diberdayakan untuk menentukan prioritas pembangunannya sendiri, sehingga partisipasi bukan sekadar formalitas melainkan instrumen pemberdayaan sosial. Studi Rayyani *et al.* (2024) turut menunjukkan bahwa pembangunan partisipatif memperkuat rasa kepemilikan masyarakat dan kepercayaan sosial terhadap pemerintah lokal di Indonesia.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat bukan hanya instrumen teknis pembangunan, tetapi juga wujud nyata dari demokratisasi sosial yang menempatkan warga sebagai aktor utama perubahan. Tanpa adanya partisipasi, pembangunan cenderung menghasilkan kesenjangan sosial dan kehilangan legitimasi sosial di tingkat akar rumput. Heri dan Supardal (2024) menunjukkan bahwa meskipun perangkat regulasi telah mendukung partisipasi, keterlibatan masyarakat masih sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan desa, tingkat pendidikan warga, dan kekuatan budaya gotong royong. Fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya mampu mengubah praktik sosial yang bersifat hierarkis di tingkat lokal.

Namun, pembangunan desa di Indonesia sering kali dihadapkan pada dilema antara kebutuhan administratif birokratis dengan semangat pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, pendekatan pembangunan masih menempatkan warga sebagai objek kebijakan, bukan subjek yang memiliki otonomi sosial. Ulber Silalahi (2022) mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan desa berkaitan erat dengan kemampuan kepala desa memotivasi masyarakat dan membangun komunikasi dua arah. Kepemimpinan partisipatif mampu mendorong keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Namun, masih banyak kepala desa yang menjalankan pembangunan secara *top-down*. Akibatnya, ruang musyawarah desa yang seharusnya menjadi arena deliberatif sering kali berubah menjadi formalitas administratif semata.

Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa menghadapi tantangan klasik berupa keterbatasan akses pendidikan, lapangan kerja, dan fasilitas publik. Berdasarkan data BPS Kecamatan Buer Dalam Angka (2024), Desa Kalabeso berpenduduk 1.641 jiwa atau 8,95% dari total penduduk Kecamatan Buer, dengan kepadatan 31,92 jiwa/km² pada wilayah seluas sekitar 48,15 km², menjadikannya salah satu desa terluas di kecamatan tersebut. Namun faktanya, luas wilayah menjadi hambatan dalam pemerataan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Oleh karena itu, fenomena tersebut menjadi dasar penting untuk memahami dinamika keterlibatan serta tantangan yang dihadapi masyarakat Kalabeso dalam proses pembangunan desa.

Secara sosial ekonomi, masyarakat Kalabeso sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian dengan pola kerja subsisten. Ketergantungan pada sektor primer

yang fluktuatif menjadikan masyarakat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi harian daripada partisipasi jangka panjang dalam pembangunan desa. Kondisi ini sejalan dengan temuan Samaun *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi warga sering kali dipicu oleh faktor ekonomi, keterbatasan waktu, dan rendahnya kesadaran terhadap manfaat pembangunan jangka panjang. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek ekonomi merupakan determinan penting dalam pola partisipasi masyarakat pedesaan.

Partisipasi masyarakat di Desa Kalabeso dapat diamati dalam berbagai kegiatan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa musyawara besar pembangun desa dan kegiatan gotong royong membangun infrastruktur jalan. Namun, partisipasi ini cenderung bersifat simbolik, terbatas pada tahapan pelaksanaan fisik tanpa keterlibatan dalam perencanaan dan evaluasi. Darin *et al.* (2022) menemukan bahwa kehadiran warga dalam forum Musrenbang sering didorong kewajiban formal, bukan kesadaran kritis terhadap arah pembangunan, sehingga hasil musyawarah tidak selalu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Situasi seperti ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif partisipasi dan praktik sosial yang terjadi di lapangan.

Dari perspektif sosial budaya, masyarakat Desa Kalabeso masih menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan, yang menjadi fondasi penting dalam pembangunan partisipatif. Namun, norma hierarki adat sering kali menjadi hambatan bagi warga untuk menyampaikan pendapat secara terbuka, terutama bagi perempuan dan kelompok muda. Hambatan kultural ini memperkuat pola komunikasi satu arah antara elit desa dan masyarakat umum. Temuan Harfis *et al.* (2019) memperkuat hal tersebut, bahwa perempuan di pedesaan masih menghadapi hambatan struktural dalam keterlibatan publik karena peran domestik dan rendahnya tingkat pendidikan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya dipengaruhi faktor struktural ekonomi, tetapi juga oleh faktor budaya dan relasi gender yang timpang.

Keterbatasan sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi. Rendahnya tingkat pendidikan warga menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pembangunan desa dan hak partisipatif mereka. Banyak masyarakat yang menganggap proses pembangunan sebagai urusan pemerintah, bukan tanggung jawab kolektif. Selain itu, faktor keterbatasan waktu akibat kesibukan bekerja di sektor pertanian menjadikan keterlibatan dalam forum desa rendah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-ekonomi yang melingkupinya. Maka, strategi pembangunan harus mampu menyeimbangkan antara pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas sosial warga.

Dampak rendahnya partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial. Ketika warga merasa tidak dilibatkan, muncul rasa ketidakpedulian terhadap hasil pembangunan. Fasilitas umum menjadi kurang terawat, dan kegiatan kolektif seperti gotong royong mengalami penurunan intensitas. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengikis modal sosial dan rasa solidaritas masyarakat desa. Padahal, modal sosial merupakan kekuatan utama dalam menopang keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal. Rendahnya rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan menciptakan siklus pasif di mana masyarakat hanya menjadi penerima manfaat, bukan penggerak utama pembangunan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di berbagai wilayah Indonesia. Harfis *et al.* (2019) mengidentifikasi hambatan pendidikan, ketimpangan gender, dan lemahnya komunikasi di Sumatera Barat. Apriyani & Arif (2019) serta Mulya Lestari & Eko Wahyuningsih (2021)

masing-masing menemukan bahwa partisipasi warga di Desa Toyareka dan dalam penyusunan RKPDDes belum berjalan maksimal, khususnya pada tahap perencanaan dan pengawasan. Heri (2024) menyoroti pengaruh kepemimpinan, pendidikan, dan gotong royong terhadap partisipasi, namun bersifat deskriptif umum dan belum mendalami konteks lokal tertentu. Silalahi (2023) menitikberatkan pada gaya kepemimpinan desa di Sumatera tanpa menelusuri nilai sosial-budaya secara mendalam. Samaun *et al.* (2022) menyoroti peran pemerintah Desa Oluhuta, Gorontalo Utara, dalam mendorong partisipasi melalui sosialisasi, dengan hambatan berupa faktor ekonomi dan rendahnya motivasi warga. Darin *et al.* (2022) menemukan bahwa partisipasi dalam Musrenbang di Gorontalo sering bersifat formalitas dan didominasi aparat desa.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut yang bersifat normatif dan berskala luas, penelitian ini memusatkan perhatian pada satu konteks lokal Desa Kalabeso dengan menelaah secara mendalam hubungan sosial, norma budaya, relasi gender, dan persepsi warga sebagai faktor pembentuk perilaku partisipatif, sekaligus menggunakan kerangka teori fungsionalisme struktural yang belum banyak digunakan dalam kajian sejenis di wilayah Sumbawa.

Desa Kalabeso sebagai fokus penelitian memiliki kompleksitas sosial yang khas. Selain faktor ekonomi dan pendidikan, pengaruh budaya lokal, pola kepemimpinan desa, dan interaksi sosial antarwarga turut membentuk pola partisipasi. Dalam konteks ini, dinamika partisipasi masyarakat menjadi refleksi dari hubungan antara struktur sosial dan nilai-nilai lokal. Penelitian ini berupaya memahami secara mendalam bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, sejauh mana mereka terlibat dalam pengambilan keputusan, serta apa saja faktor yang menghambat dan mendukung keterlibatan tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap makna partisipasi dari perspektif warga sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan: (1) apa saja faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Kalabeso; dan (2) bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa tersebut. Penelitian bertujuan mengidentifikasi hambatan partisipasi sekaligus mendeskripsikan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat pada tiga tahap pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi), dengan manfaat teoretis memperkaya kajian sosiologi pembangunan berbasis lokalitas Sumbawa dan manfaat praktis sebagai masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif dan responsif gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Kalabeso serta faktor-faktor yang menghambatnya. Lokasi penelitian dipilih secara purposive di Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, dengan pertimbangan tingkat partisipasi yang fluktuatif, jumlah penduduk terbanyak di kecamatan, serta karakteristik sosial-ekonomi agraris yang kental dengan nilai gotong royong dan hierarki adat.

Subjek penelitian ditentukan melalui *purposive sampling* yang mencakup tujuh kelompok narasumber, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, dengan total 14 informan. Objek penelitian meliputi bentuk partisipasi masyarakat, hambatan sosial-ekonomi-budaya, serta relasi antara pemerintah desa dan warga dalam proses pembangunan. Sumber data terdiri atas data primer (wawancara mendalam dan observasi lapangan) serta data sekunder (dokumen RPJMDes, APBDes, data BPS Kecamatan Buer Dalam Angka, dan literatur ilmiah pendukung) (Sugiyono, 2017).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan data ke dalam kategori, menguraikannya menjadi unit-unit informasi, mensintesis temuan, dan menyusun pola sesuai kerangka teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons melalui skema AGIL. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai lensa analisis untuk menilai sejauh mana sistem sosial desa menjalankan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola nilai partisipatif, tanpa menggunakan perhitungan statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam yang dilaksanakan di Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa. Penyajian data mengikuti kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons melalui skema AGIL, yang terdiri dari empat indikator: *Adaptation* (Adaptasi), *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan), *Integration* (Integrasi), dan *Latency* (Pemeliharaan Pola). Keempat fungsi ini saling berhubungan dalam menjaga stabilitas sistem sosial desa sebagai landasan keberlangsungan pembangunan.

1. *Adaptation* (Adaptasi)

Indikator adaptasi dalam kerangka AGIL Parsons merujuk pada kemampuan sistem sosial desa dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tantangan pembangunan. Fungsi ini mencerminkan sejauh mana masyarakat dan pemerintah desa mampu merespons dinamika kebijakan, kondisi ekonomi, serta mekanisme baru dalam tata kelola pembangunan.

Fungsi adaptasi berjalan relatif baik melalui mekanisme sosialisasi formal yang transparan dari pemerintah desa lewat jaringan RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Kepala Desa menegaskan bahwa perencanaan yang matang dan sosialisasi anggaran secara terbuka dimulai dari RKPDes hingga APBDes, dilengkapi pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang melibatkan tokoh adat, agama, pemuda, dan perempuan agar adaptasi berjalan inklusif. Sekretaris Desa menambahkan bahwa penyebaran informasi jadwal Musrenbangdes melalui RT/RW dan penyederhanaan bahan sosialisasi menjadi strategi penting agar warga dapat berpartisipasi secara bermakna.

Modal sosial berupa musyawarah, gotong royong, dan nilai keagamaan turut mendorong penerimaan warga terhadap program pembangunan baru. Tokoh agama menegaskan bahwa membangun desa dipandang sebagai bagian dari amal jariyah, sementara tokoh adat menekankan pentingnya dialog dengan pemerintah desa sebelum program baru dilaksanakan agar tidak berbenturan dengan nilai adat. Karang taruna, melalui tokoh pemuda, menunjukkan adaptasi yang lebih cepat terhadap program baru dan memanfaatkan media sosial sebagai saluran informasi kepada warga muda lainnya.

Meski demikian, ditemukan disfungsi parsial pada kelompok perempuan yang menanggung beban ganda antara pekerjaan domestik dan pertanian sekaligus rasa kurang percaya diri berbicara dalam forum yang didominasi laki-laki, serta pada kelompok berpendidikan rendah yang kesulitan memahami prosedur administratif Musrenbangdes. Kondisi ini menunjukkan bahwa subsistem sosial dan budaya belum sepenuhnya mendukung fungsi adaptasi secara merata di seluruh lapisan masyarakat, sehingga pemerintah desa perlu merancang strategi sosialisasi yang lebih kontekstual dan responsif gender.

2. *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan)

Indikator *Goal Attainment* dalam skema AGIL Parsons merujuk pada kemampuan sistem sosial dalam merumuskan tujuan bersama dan mengarahkan sumber daya untuk mencapainya. Dalam konteks pembangunan desa, fungsi ini mencerminkan bagaimana pemerintah desa dan masyarakat bersama-sama menetapkan, menetapkan prioritas pembangunan, mengalokasikan sumber daya, dan mengevaluasi pencapaian tujuan secara kolektif.

Fungsi pencapaian tujuan tercermin dari realisasi pembangunan yang mencapai 80% dari target RPJMDes. Perumusan tujuan berjalan berjenjang melalui pengumpulan usulan di tingkat RT/RW yang dibawa ke forum Musrenbangdes, sehingga aspirasi warga terwakili secara representatif meski Sekretaris Desa mengakui masih perlu mendorong lebih banyak warga hadir langsung, bukan hanya diwakili tokoh masyarakat. Keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam Tim Pelaksana Kegiatan memberikan legitimasi sosial yang kuat terhadap prioritas pembangunan, khususnya pada infrastruktur pertanian yang dipandang mencerminkan kemaslahatan dan keadilan bagi mayoritas petani.

Namun, dalam perspektif Fungsionalisme Struktural Parsons, inklusivitas penetapan tujuan masih menjadi titik lemah sistem. Aspirasi kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok marginal lainnya belum sepenuhnya terinternalisasi dalam rumusan tujuan pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya potensi disfungsi dalam subsistem politik (*Goal Attainment*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan jangka panjang dan melemahkan legitimasi program pembangunan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perhatian terhadap keragaman kebutuhan sosial menjadi prioritas yang perlu segera diperbaiki dan disempurnakan melalui mekanisme musyawarah yang lebih inklusif.

3. *Integration* (Integrasi)

Indikator *Integration* dalam skema AGIL Parsons merujuk pada kemampuan sistem sosial dalam menjaga kohesi, koordinasi, dan keteraturan hubungan antarsubsistem. Dalam konteks pembangunan desa, fungsi ini mencerminkan bagaimana koordinasi antara berbagai kelompok sosial – pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, dan lembaga adat dapat menghasilkan kolaborasi yang harmonis dan produktif dalam pembangunan.

Fungsi integrasi merupakan fungsi yang berjalan paling harmonis di antara keempat fungsi AGIL. Integrasi sosial ditandai oleh minimnya konflik antarkelompok dalam proses pembangunan dan kuatnya koordinasi lintas elemen masyarakat yang difasilitasi oleh kelembagaan desa. Dalam perspektif Fungsionalisme Struktural Parsons, fungsi integrasi yang berjalan optimal merupakan indikator bahwa subsistem sosial mampu memelihara kohesi dan menjaga orientasi kolektif terhadap tujuan pembangunan bersama.

Koordinasi lintas kelembagaan seperti PKK, karang taruna, lembaga adat, dan BPD dengan pemerintah desa berlangsung rutin melalui forum LKD, didukung kepemimpinan kepala desa yang terbuka dan transparan dalam pengelolaan anggaran sehingga menumbuhkan kepercayaan sosial antarwarga. Tokoh masyarakat menegaskan bahwa hubungan yang mudah diakses antara aparat desa dan warga biasa membuat masyarakat merasa tidak ada yang disembunyikan dalam pengelolaan pembangunan.

Nilai gotong royong dalam tradisi adat Kalabeso, yang diperkuat konsep ta'awun (tolong-menolong) dan ukhuwah (persaudaraan) dalam ajaran Islam, menjadi fondasi kultural integrasi sosial yang sangat kuat tokoh adat bahkan menyatakan bahwa gotong royong telah menjadi kewajiban sosial sehingga warga yang tidak

terlibat kegiatan bersama dapat merasa kurang diterima dalam komunitas. Namun, koordinasi antara karang taruna dan pemerintah desa yang belum terlembagakan secara formal menjadi celah yang perlu segera diperbaiki. Tanpa formalisasi mekanisme koordinasi tersebut, konsistensi keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan akan bergantung pada inisiatif personal semata, bukan pada sistem yang berkelanjutan.

4. Latency (Pemeliharaan Pola)

Indikator Latency atau pattern maintenance dalam skema AGIL Parsons merujuk pada kemampuan sistem sosial dalam mempertahankan nilai, norma, dan motivasi yang mendukung kesinambungan partisipasi masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan pewarisan nilai-nilai budaya, penguatan identitas komunal, dan pemeliharaan semangat kolektif lintas generasi.

Mekanisme Formal dan Informal dalam Memelihara Pola Partisipasi Kepala Desa mengidentifikasi tradisi lokal sebagai instrumen utama pemeliharaan semangat partisipasi. Di satu sisi, kombinasi mekanisme formal (Musrenbangdes rutin) dan informal (tradisi sedekah orong, gotong royong, pengajian, majelis taklim) masih cukup efektif dalam memelihara pola nilai partisipatif. Di sisi lain, ancaman serius berupa pergeseran orientasi nilai generasi muda, dari kolektif menuju individual serta efek samping program bantuan sosial instan yang melemahkan etos kerja bersama, mengancam keberlangsungan fungsi pemeliharaan pola ini.

Fungsi pemeliharaan pola berada pada kondisi paling kritis di antara keempat fungsi AGIL. Kombinasi mekanisme formal (Musrenbangdes tahunan) dan informal (tradisi sedekah orong, pengajian, majelis taklim) masih cukup efektif menjaga nilai partisipatif, dengan lembaga keagamaan berperan strategis mewariskan kesadaran partisipatif melalui madrasah, TPQ, dan remaja masjid sebagai wahana latihan berkontribusi bagi desa. Tokoh adat turut menegaskan bahwa nilai gotong royong, musyawarah, dan sarei (saling menghormati) masih menjadi identitas kuat masyarakat Kalabeso.

Akan tetapi, Sekretaris Desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda secara konsisten mengonfirmasi adanya pergeseran nilai generasi muda ke arah individualistis, yang dipicu budaya digital dan ketergantungan pada program bantuan sosial instan seperti BLT dan PKH yang melemahkan etos kerja bersama. Kepala Desa merespons tantangan ini dengan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja sebagai alternatif ketergantungan pada bantuan instan.

Dalam perspektif Parsons, melemahnya fungsi latency berpotensi berdampak berantai pada ketiga fungsi AGIL lainnya, sehingga penguatan kemandirian ekonomi dan reinterpretasi nilai gotong royong yang relevan bagi generasi muda menjadi prioritas mendesak bagi keberlanjutan sistem partisipasi di Desa Kalabeso. Oleh karena itu, strategi reinterpretasi nilai-nilai gotong royong dalam konteks yang relevan bagi generasi muda, dikombinasikan dengan kebijakan yang mendorong kemandirian ekonomi daripada ketergantungan pada bantuan sosial, menjadi imperatif bagi keberlanjutan sistem partisipasi masyarakat Desa Kalabeso.

Pembahasan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam perspektif sosiologi pembangunan, partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran fisik dalam kegiatan, tetapi juga mencakup kontribusi ide, tenaga, serta pengambilan keputusan secara kolektif. Keterlibatan ini menjadi indikator

penting dalam mewujudkan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, karena masyarakat bukan sekadar objek, melainkan subjek utama yang memiliki pengetahuan lokal, kebutuhan nyata, serta kepentingan langsung terhadap hasil pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat berperan dalam meningkatkan efektivitas program sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan.

Namun, tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan struktural. Hambatan seperti pola pikir tradisional, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses informasi, Selain itu, budaya sungkan atau rasa enggan menyampaikan pendapat juga menjadi kendala dalam proses musyawarah pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, transparansi informasi, serta penciptaan ruang partisipatif yang terbuka dan demokratis. Dengan kondisi tersebut, partisipasi masyarakat dapat berkembang dari sekadar formalitas menjadi keterlibatan yang substansial dalam mendorong pembangunan desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, dapat disimpulkan bahwa bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong belum optimal. Partisipasi masyarakat lebih banyak terlihat pada tahap pelaksanaan pembangunan, seperti kegiatan gotong royong, pembangunan jalan desa, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada tahap perencanaan dan evaluasi pembangunan, keterlibatan masyarakat masih bersifat simbolik dan formalitas, di mana sebagian warga hanya hadir dalam musyawarah tanpa terlibat aktif dalam pengambilan keputusan.

Rendahnya tingkat partisipasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor pertanian, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi dalam pembangunan, keterbatasan waktu akibat aktivitas pekerjaan, serta adanya budaya hierarki sosial yang membuat masyarakat, khususnya perempuan dan pemuda, kurang berani menyampaikan pendapat. Selain itu, kurangnya komunikasi dan transparansi dari pemerintah desa juga menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya keterlibatan masyarakat.

Meskipun demikian, masyarakat Desa Kalabeso masih memiliki nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan rasa kebersamaan yang kuat sebagai modal sosial penting dalam mendukung pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat, komunikasi yang lebih terbuka, serta pelibatan warga secara aktif dan inklusif agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan:

1. *Adaptation* (Adaptasi)

Fungsi adaptasi dalam sistem sosial Desa Kalabeso berjalan dengan relatif baik. Pemerintah desa telah membangun mekanisme sosialisasi formal yang transparan melalui jaringan RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), sehingga informasi program pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Faktor pendukung utama adaptasi adalah kuatnya modal sosial berupa tradisi musyawarah dan gotong royong, serta nilai-nilai keagamaan yang menanamkan spirit kolektif dalam membangun desa. Generasi muda, khususnya karang taruna, menunjukkan kemampuan adaptasi yang lebih cepat terhadap program baru, termasuk melalui pemanfaatan media sosial sebagai saluran informasi. Namun, disfungsi parsial ditemukan pada kelompok perempuan yang menghadapi beban ganda antara pekerjaan domestik dan pertanian, serta kelompok masyarakat

berpendidikan rendah yang kesulitan memahami prosedur formal pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa subsistem sosial dan budaya belum sepenuhnya mendukung fungsi adaptasi secara inklusif bagi seluruh segmen masyarakat.

2. *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan)

Fungsi pencapaian tujuan dalam sistem pembangunan Desa Kalabeso telah berjalan cukup efektif, yang tercermin dari capaian realisasi pembangunan sebesar 80% dari target RPJMDes. Mekanisme perumusan tujuan berjalan secara berjenjang melalui pengumpulan aspirasi di tingkat RT/RW yang kemudian dibawa ke forum Musrenbangdes, sehingga aspirasi masyarakat terwakili secara representatif. Keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam Tim Pelaksana Kegiatan memberikan legitimasi sosial yang kuat terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Meski demikian, inklusivitas penetapan tujuan masih menjadi kelemahan sistem. Aspirasi kelompok perempuan dan pemuda belum sepenuhnya terakomodasi dalam prioritas pembangunan, misalnya kebutuhan akan fasilitas kesehatan ibu dan anak, program pelatihan keterampilan perempuan, serta program kewirausahaan dan digitalisasi untuk pemuda. Disfungsi dalam subsistem politik ini berpotensi menciptakan ketidakpuasan jangka panjang dan melemahkan legitimasi program pembangunan desa.

3. *Integration* (Integrasi)

Fungsi integrasi merupakan fungsi yang berjalan paling harmonis di antara keempat fungsi AGIL dalam sistem sosial Desa Kalabeso. Minimnya konflik antar kelompok dalam proses pembangunan dan kuatnya koordinasi lintas elemen masyarakat menjadi indikator utama berfungsinya subsistem sosial secara efektif. PKK, karang taruna, lembaga adat, dan BPD secara rutin berkoordinasi dengan pemerintah desa dan terlibat dalam forum-forum perencanaan pembangunan. Kepemimpinan kepala desa yang dikenal terbuka dan responsif terhadap aspirasi warga turut memperkuat kepercayaan sosial dan kohesi antarkelompok.

Nilai gotong royong yang mengakar dalam tradisi adat Kalabeso, diperkuat oleh ajaran Islam tentang ta'awun (tolong-menolong) dan ukhuwah (persaudaraan), menjadi fondasi kultural integrasi sosial yang sangat kuat. Namun, koordinasi antara karang taruna dan pemerintah desa yang belum terlembagakan secara formal menjadi celah yang perlu segera diperbaiki agar konsistensi keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan tidak bergantung pada inisiatif personal semata.

4. *Latency* (Pemeliharaan Pola)

Fungsi pemeliharaan pola berada dalam kondisi kritis namun masih dapat dipertahankan. Kombinasi mekanisme formal berupa Musrenbangdes yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun, dan mekanisme informal berupa tradisi sedekah orong, kegiatan pengajian, serta majelis taklim, masih cukup efektif dalam memelihara pola nilai partisipatif di masyarakat. Lembaga keagamaan berperan strategis dalam menanamkan kesadaran partisipatif kepada warga melalui pesan-pesan keagamaan yang mengaitkan pembangunan desa dengan nilai ibadah dan tanggung jawab sosial.

Ancaman serius bagi fungsi *latency* adalah pergeseran orientasi nilai generasi muda dari kolektif menuju individualistik, yang dipengaruhi oleh budaya digital dan dampak negatif program bantuan sosial instan yang melemahkan etos kerja bersama. Dalam perspektif Parsons, melemahnya fungsi *latency* ini berpotensi berantai merusak ketiga fungsi AGIL lainnya, sehingga menjadi prioritas perhatian yang paling mendesak dalam mempertahankan keberlanjutan sistem partisipasi masyarakat Desa Kalabeso.

KESIMPULAN

Bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat Desa Kalabeso masih belum optimal. Partisipasi lebih banyak terwujud pada tahap pelaksanaan fisik pembangunan (gotong royong, pembangunan jalan), sementara keterlibatan pada tahap perencanaan dan evaluasi masih bersifat simbolik dan formalitas. Ditinjau dari skema AGIL, fungsi Integrasi berjalan paling harmonis berkat nilai gotong royong dan ajaran Islam; fungsi Adaptasi dan Pencapaian Tujuan cukup baik dengan realisasi 80% target RPJMDes; sedangkan fungsi Pemeliharaan Pola paling terancam akibat pergeseran nilai generasi muda ke arah individualistik dan ketergantungan pada bantuan sosial instan.

Hambatan utama partisipasi meliputi keterbatasan ekonomi rumah tangga petani, rendahnya pendidikan dan pemahaman warga atas hak partisipatif, keterbatasan waktu akibat kesibukan bertani, norma gender dan hierarki adat yang membatasi ruang bicara perempuan dan pemuda, serta minimnya transparansi komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan warga. Modal sosial berupa gotong royong dan solidaritas tetap menjadi kekuatan utama yang perlu terus dipelihara dan direvitalisasi dalam bentuk yang relevan bagi generasi muda. Oleh karena itu, inklusivitas mekanisme Musrenbangdes perlu diperkuat dengan penjadwalan yang tidak berbenturan dengan jam kerja pertanian, memformalkan koordinasi dengan karang taruna melalui agenda pertemuan rutin, mengembangkan program penguatan kapasitas perempuan, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui BUMDes sebagai alternatif atas ketergantungan pada bantuan sosial instan.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Kalabeso

Pemerintah desa perlu merancang ulang mekanisme Musrenbangdes agar lebih inklusif dengan menjadwalkan forum pada waktu yang tidak bertabrakan dengan jam kerja pertanian, menyediakan sesi khusus aspirasi perempuan dan pemuda, serta memastikan bahwa usulan yang masuk melalui RT/RW benar-benar disampaikan secara utuh dan akurat. Selain itu, perlu dipertimbangkan penggunaan platform digital sederhana sebagai saluran partisipasi alternatif bagi warga yang tidak dapat hadir langsung dalam forum.

2. Bagi Tokoh Adat, Masyarakat, dan Agama

Para tokoh masyarakat, adat, dan agama diharapkan dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam mendorong partisipasi inklusif, khususnya dengan secara eksplisit memberi ruang dan mendorong perempuan serta pemuda untuk menyuarakan pendapat mereka dalam forum-forum musyawarah. Keteladanan para tokoh dalam menghormati dan merespons aspirasi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan akan sangat berpengaruh dalam menggeser norma sosial ke arah yang lebih egaliter.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi *Participatory Action Research* (PAR) yang tidak hanya mendeskripsikan dinamika partisipasi, tetapi juga secara aktif terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah teridentifikasi. Pendekatan ini akan menghasilkan temuan yang lebih transformatif dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas partisipasi masyarakat Desa Kalabeso.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, L., & Arif, D. B. (2019). Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa Toyareka Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 61-66.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Darin, D., Moonti, U., & Dai, S. I. S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 11-21.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Oxford: Blackwell.
- Hadi, S., Marta, A., Amin, R. M., & Febrina, R. (2024). Rural Development in Community Empowerment Through the Governance of Village-Owned Enterprises (BUMDes). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 23(1), 121-134.
- Harfis, H., Sopyan, S., & Afrizal, D. (2019). Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 1(2), 30-37.
- Heri, A., & Supardal. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 1376-1388.
- Jamaludin, A. N. (2016). *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lestari, S. M., & Wahyuningsih, Y. E. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). *Jurnal Sosial dan Sains*, 1(10), 1254-1261.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. New York: The Free Press.
- Qotrunnada, Q. (2023). Tindakan tradisional dalam partisipasi sosial masyarakat desa: Tinjauan teori aksi sosial Max Weber. *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya*, 5(1), 22-35.
- Rahman, K. (2015). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 1(2), 189-199.
- Rambe, R. Y., Silitonga, C. R., & Arieta, S. (2025). Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Menentukan Partisipasi Pokmaswas pada Masyarakat Pesisir di Desa Pulau Pinang, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 1524-1532.
- Rayyani, R., Hasyim, M., & Kurniawan, A. (2024). Pembangunan Partisipatif dan Kepercayaan Sosial Terhadap Pemerintah Lokal di Indonesia. *Journal of Indonesian Social Development and Policy (JISDP)*, 6(1), 33-50.
- Ridwan, M. (2024). Tindakan Rasional Nilai Dalam Keterlibatan Masyarakat Pada Program Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 3(2), 88-102.
- Riyanto, A., & Kovalenko, I. (2023). Community Participation and Welfare State Transformation in Rural Indonesia. *Asian Journal of Social Policy*, 19(2), 201-218.

- Salsabila, M. S., & Fauzi, A. M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri). *Jurnal Pariwisata Terapan*, 5(1), 38-49.
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 18-33.
- Silalahi, U. (2023). *Kepemimpinan Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Studi Deskriptif Kualitatif Di Beberapa Desa Di Sumatera*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Soekanto, S. (1986). *Talcott Parsons: Fungsionalisme Impretif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- United Nations Development Programme. (2023). *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World*. New York: UNDP.
- Wulansari, D. (2015). Peran Masyarakat Dalam Penyusunan RPJMDes Sebagai Wujud Otonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 112-125.